Kementerian PPN/ Bappenas

ASEAN INDONESIA 2023

Sambutan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Senin, 17 April 2023

Kerangka Paparan

01 Tantangan Pembangunan Global dan Nasional 2024

02 Rancangan RKP 2024

03 Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Tantangan Pembangunan Global dan Nasional 2024

PRAKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2023

UPSIDE RISK

- Potensi penurunan inflasi yang lebih cepat
- Terjaganya daya beli sejalan dengan tingkat tabungan (*saving*) yang tinggi
- Kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan aktivitas (*reopening*) Tiongkok pasca kebijakan Zero COVID Policy

DOWNSIDE RISK

- Risiko tekanan inflasi yang persisten
- Ekskalasi perang di Ukraina dan Fragmentasi geopolitik
- Risiko perubahan harga di pasar keuangan

Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 (%)

International Monetary Fund	World Bank Group	OECD	Bloomberg	Oxford Economics
2,9	1,7	2,2	2,4	1,5
per Januari 2023	per Januari 2023	per November 2022	per 13 Maret 2023	per Februari 2023

Keterangan:

- Meningkat dari proyeksi sebelumnya
- Menurun dari proyeksi sebelumnya
- Sama dengan proyeksi sebelumnya

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2024

Ekonomi global 2024 diprakirakan tumbuh lebih baik, didorong oleh perbaikan rantai pasok global dan inflasi yang mengalami normalisasi.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2024					
	IMF		WB		OECD
	OKT 22	JAN 23	JUN 22	JAN 23	NOV 22
World	**3,2**	**3,1**	**2,9**	**2,7**	**2,7**
Major Economies	**1,6**	**1,4**	**1,9**	**1,6**	
Amerika Serikat	1,2	1,0	2,0	1,6	1,0
Euro Area	1,8	1,6	1,9	1,6	1,4
Jepang	1,3	0,9	0,6	0,7	0,9
Emerging Markets	**4,3**	**4,2**	**4,4**	**4,1**	
China	4,5	4,5	5,1	5,0	4,1
Indonesia	**5,4**	**5,1**	**5,3**	**4,9**	**5,1**
Thailand	3,6	3,6	3,9	3,7	
Malaysia	4,9	4,9	4,4	3,9	
Filipina	6,0	6,0	5,6	5,9	
Brazil	1,9	1,5	2,0	2,0	1,4
India	6,8	6,8	7,1	6,1	6,9

Sumber: *WEO IMF Jan 2023, GEP WB Jan 2023, OECD Report Nov 2022*

Upside Risk

- Perbaikan rantai pasok global yang sebelumnya terhambat akibat Geopolitik Rusia-Ukraina
- Inflasi mengalami normalisasi seiring dengan respons bank sentral

Downside Risk

- Turunnya permintaan logam dan energi global dari Tiongkok
- Geopolitik Rusia-Ukraina belum menemui titik akhir menyebabkan ketidakpastian yang berkelanjutan
- Dampak perubahan iklim menyebabkan disrupsi rantai pasok global akibat krisis sumber daya

Sumber: Global Economic Prospects, Wolrd Bank per Jan 2023

TREN CAPAIAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Pembangunan	*Baseline* (2019)	2022		Target 2023 (RKP) [b)]	Target 2024 (RPJMN) [c)]
			Target (RKP) [a)]	Capaian		
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0	5,2-5,5	**5,31**	5,3-5,5	6,2-6,5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	9,41	8,5-9,0	**9,57**	7,5-8,5	6,0-7,0
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,28	5,5-6,3	**5,86**	5,3-6,0	3,6-4,3
4.	Rasio Gini (nilai)	0,382	0,376-0,378	**0,381**	0,375-0,378	0,360-0,374
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	71,92	73,41-73,46	**72,91**	73,31-73,49	75,54
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	24,92	26,87	**26,87**	27,02	27,3
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	100,9	103-105	**107,33**	105-107	105
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	100,2	104-106	**106,5**	107-108	107

Keterangan:

a) Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022
b) Perpres Nomor 134/2022 tentang Pemutakhiran RKP 2023
c) Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024

Target RPJMN akan disesuaikan melalui RKP 2024 dengan mempertimbangkan capaian dan kondisi terkini

Rancangan RKP 2024

TEMA, PRIORITAS, DAN KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024

TEMA RKP Tahun 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

PRIORITAS NASIONAL

- PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024

- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
- Penguatan Daya Saing Usaha
- Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
- Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Pelaksanaan Pemilu 2024

ARAH KEBIJAKAN RKP TAHUN 2024 DILAKSANAKAN MELALUI *MAJOR PROJECT* antara lain:

(1) *Kawasan Industri Prioritas dan Smelter*
(2) *Destinasi Pariwisata Prioritas*
(3) *Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)*
(4) *Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi*
(5) *Pengelolaan Terpadu UMKM*
(6) *Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay,*
(7) *Pembangunan Ibu Kota Nusantara*
(8) *Reformasi Sistem Perlindungan Sosial*
(9) *Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*
(10) *Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0*
(11) *Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting*
(12) *Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu*
(13) *Transformasi Digital*
(14) *Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)*
(15) *Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)*
(16) *Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3*

SASARAN MAKRO EKONOMI INDONESIA TAHUN 2024

1

Investasi dan Ekspor perlu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Permintaan

Pertumbuhan Investasi (PMTB)	6,2% - 7,0%
Realisasi PMA dan PMDN	Rp1.450 T – Rp1.650 T

(Kementerian Investasi)

Pertumbuhan Ekspor Non-Migas	4,5% - 6,8%

(Kementerian Perdagangan)

SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2024

5,3%-5,7%

(PERSEN, YOY)

Peningkatan Produktivitas UMKM, Pertanian, dan Industri Manufaktur sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi sisi Produksi

3,4% – 3,8%
Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

(Kementerian Pertanian)

5,4% - 5,8%
Pertumbuhan Industri Manufaktur

(Kementerian Perindustrian)

Sehingga *share*-Industri Manufaktur meningkat menjadi 19,5%-20,6%

Sumber: Exercise Awal Bappenas, Maret 2023.

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

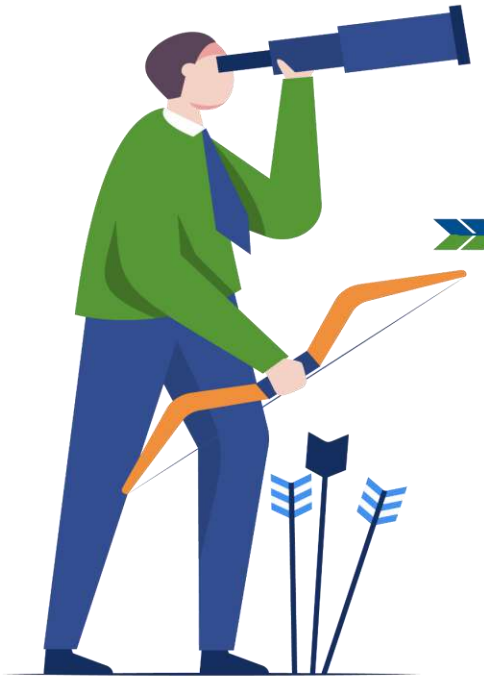

Sasaran Pembangunan

Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)
5,3-5,7	6,5-7,5	5,0-5,7
Rasio Gini (nilai)	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)
0,374-0,377	73,99-74,02	27,27

Indikator Lainnya

Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)
107-110
Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)
105-108

Keterangan:

Hasil *exercise* Bappenas Februari 2023 Rancangan Awal RKP 2024

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN RKP UNTUK PEMBANGUNAN IKN DI TAHUN 2024

Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Strategi

Pembangunan gedung pemerintahan dan hunian

- Istana Presiden
- Kantor Kementerian Koordinator
- Kantor Kementerian/Lembaga
- Hunian ASN dan TNI/POLRI

Strategi

Pembangunan infrastruktur utama

- Jalan Tol IKN
- Jalan sumbu kebangsaan
- Jaringan distribusi SPAM
- Jaringan perpipaan air limbah

Indikator

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara

Target: 3.399 Ha (dalam KIPP 6.671 Ha)

Kementerian PPN/
Bappenas

Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

POTRET PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

	INDIKATOR	NASIONAL	KALTIM
	Bidang Ekonomi		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	4,48
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	9,57	6,44
3	Rasio Gini	0,381	0,317
4	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	6	6,24
	Bidang Sosial		
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,91	77,44
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,86	5,71
	Kondisi Kesehatan		
7	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	71,85	74,62
8	Prevalensi *Stunting* (%)	21,6	23,9
9	Jumlah Kab/Kota Belum Tereliminasi Malaria (Kab/Kota)	196	7
10	***Kondisi Pendidikan***		
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,69	9,92
12	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,1	13,84
13	Angka Partisipasi Murni (APM)		
14	- SD/sederajat (%)	97,88	98,45
15	- SMP/sederajat (%)	80,89	82,65
16	- SMA/sederajat (%)	61,97	69,10
17	***Jaminan Sosial***		
18	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	86,9	104
19	Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos Naker)		
20	- Pekerja Formal (%)*	56,19	99,35
21	- Pekerja Informal (%)*	13,06	29,65

	INDIKATOR	NASIONAL	KALTIM
	Bidang Sarana Prasarana		
22	Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	19,47	62,37
23	Sanitasi Aman (%)	10,16	9,06
24	Penanganan Sampah***	33,27	60,56
25	Rumah Layak Huni	60,66	73,18
26	Permintaan listrik perkapita (kWh)	1122	962,86
27	Porsi kapasitas pembangkit listrik terbarukan (%)	15,47	1,59
28	Jaringan Internet (%)**	78,45	78,39
29	Kemantapan Jalan*		
	Nasional (%)	91,81	82,41
	Provinsi (%)	74,12	61,98
	Kabupaten (%)	60	59,18
	Kota (%)	81,2	88,01
	Bidang Tata Kelola		
30	Indeks Pelayanan Publik		Baik
31	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	74,43 (data komisi info)	77,61
32	Indeks Integritas	72,43	73,04
	Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan		
33	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	135,56	146,67
34	Indeks Ketahanan Pangan	60,2	77,65
35	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%)	10,21	16,19

Keterangan:
font merah: kinerja lebih buruk dibandingkan capaian nasional
font biru: kinerja lebih baik dibandingkan capaian nasional

Sumber: BPS 2022 (berdasarkan semester 1 setiap tahunnya), SSGI 2021, KemenPANRB (diolah), Komisi Informasi Pusat RI, SPI, jaga.id, BNPB-IRBI 2021, Kementan 2021

*data tahun 2021
**data tahun 2020
***data tahun 2019

KETIMPANGAN PDRB PER KAPITA ANTAR-PROVINSI PERLU MENJADI PERHATIAN.....

***Selain Jakarta, resource-based provinces* (Batu Bara dan CPO) cenderung memiliki PDRB per kapita tinggi**

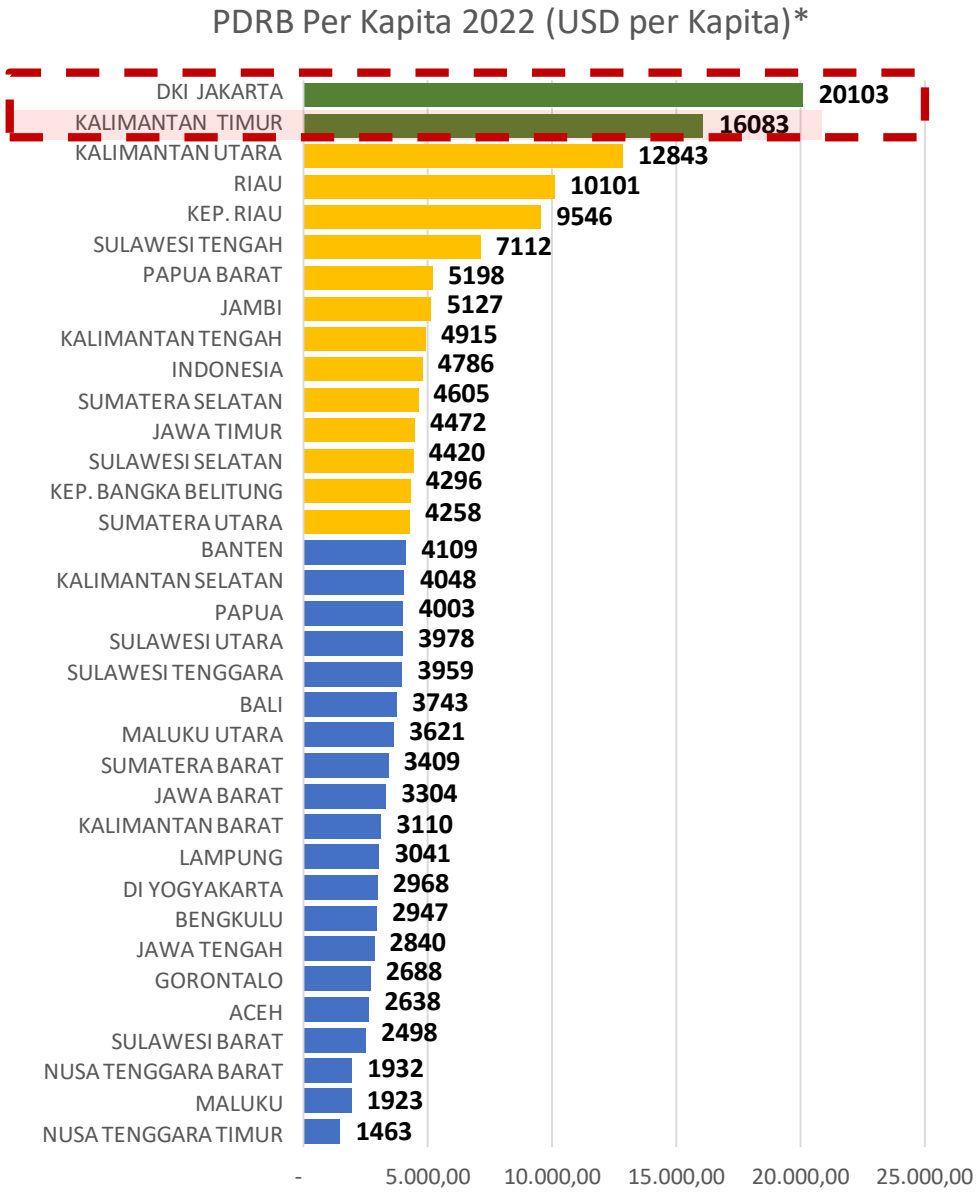

High Income

Upper-Middle Income

Lower -Middle Income

20 Provinsi berada dalam kategori *Lower-Middle Income*

Pertumbuhan ekonomi yang Lebih tinggi perlu diprioritaskan di wilayah yang berstatus *Lower-Middle Income*

*PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Sumber: BPS (diolah)

CAPAIAN HIGHLIGHT SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

Indikator	Capaian	Target	
		RKP	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi (2022, %)	4,48	**5,30**	**2,50**
Tingkat Kemiskinan (Sept, %)	6,44	**5,80**	**6,00**
Tingkat Pengangguran Terbuka (Agt, %)	5,71	**6,79**	**6,75**

Keterangan:
Font Merah *= belum tercapai*
Font Biru *= sudah tercapai*

Sumber: Evaluasi Pembangunan Daerah, per triwulan IV-2022
Update per tanggal 22 Februari 2023
Target RKP merupakan target RKP Kewilayahan yang dijabarkan ke 34 provinsi

Target Indikator Makro Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Rancangan Awal RKP 2024

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,1 – 5,6

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

4,78 – 5,48

Tingkat Kemiskinan (%)

3,50 – 4,00

Indeks Pembangunan Manusia

78,46 – 78,8

Rasio Gini

0,314 – 0,316

Sumber: Hasil Rakortekrenbang 2023

Growth Diagnostics Pulau Kalimantan

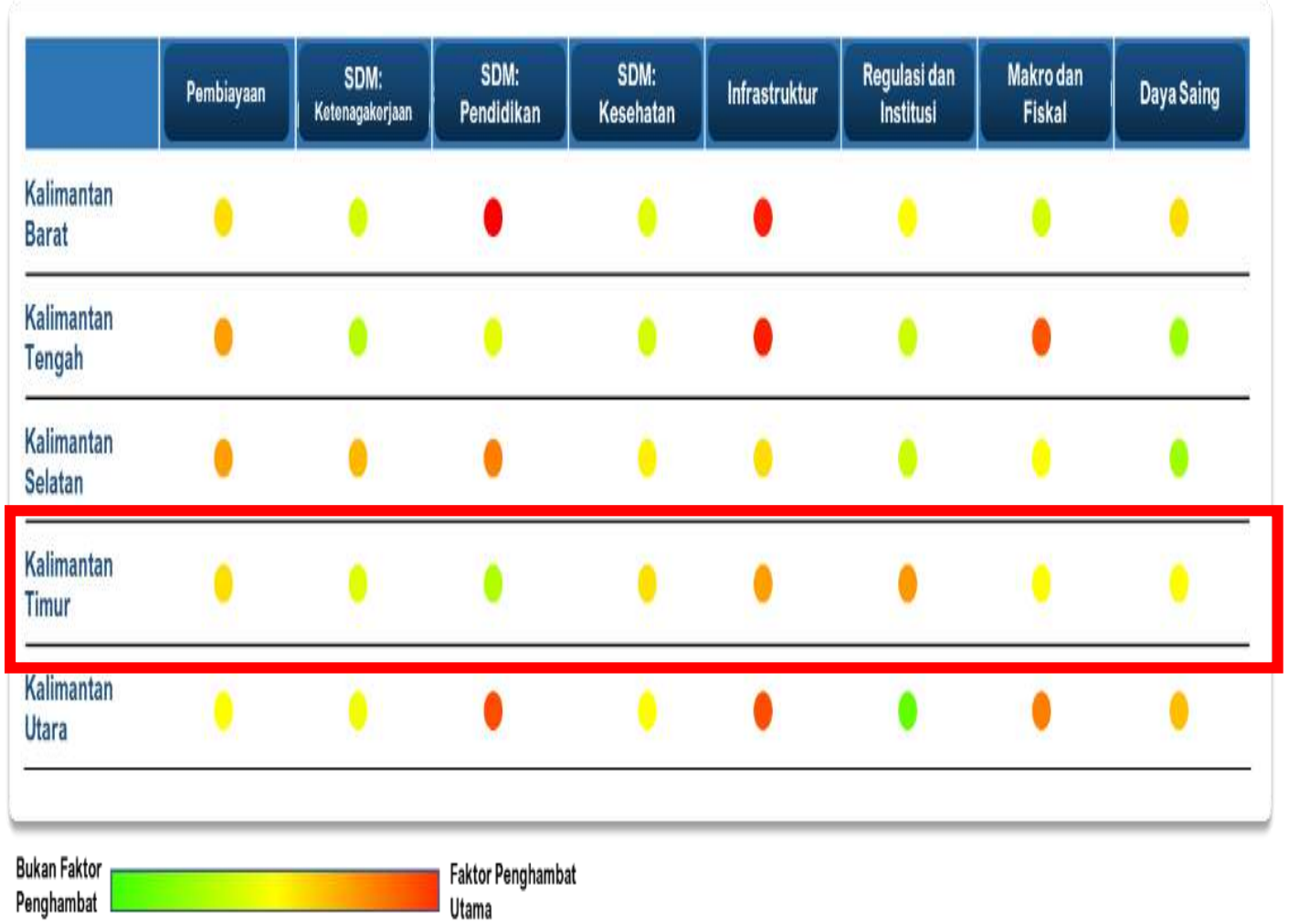

Growth Diagnostics	Isu Strategis Daerah
Regulasi dan Institusi	- Implementasi regulasi untuk mendorong daya saing daerah masih dapat ditingkatkan (Indeks Daya Saing maupun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan) - Perlkunya peningkatan koordinasi antarkebijakan dan antar pemangku kepentingan
Infrastruktur	- Kualitas jalan nasional dan provinsi masih perlu ditingkatkan - Masih rendahnya aksesbilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi
SDM : Kesehatan	- Prevalensi stunting relatif tinggi - Kepemilikan asuransi BPJS PBI relatif rendah - Jumlah RS dan tenaga kesehatan relatif terbatas
Aspek Pembiayaan	- Penggunaan kredit konsumsi relatif rendah - Penggunaan kredit di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan akmamin relatif rendah

Arah Pengembangan Wilayah Kalimantan 2024

MAJOR PROJECT

- **PN02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**
- **MP 11** Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM)
- **MP 12** Pembangunan Ibu Kota Nusantara
- **MP 13** Pembangunan Kota Baru
- **MP 16** PKSN Kawasan Perbatasan Negara

KAWASAN

- KI/KEK/KPBPB
- Wilayah Metropolitan (WM)
- Kota Baru
- Ibu Kota Nusantara
- Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
- Kawasan Transmigrasi (KT) yang Direvitalisasi: 9 Kawasan
- Kawasan Transmigrasi (KT) yang Mendukung *Food Estate*
- Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN): 11 kawasan
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional
- Kota Besar
- Kota Sedang

KORIDOR PEMBANGUNAN

- Koridor Pertumbuhan
- Koridor Pemerataan

PROGRAM PRIORITAS LAINNYA PADA RANWAL RKP TAHUN 2024

- Kecamatan Lokasi Prioritas Perbatasan Negara yang dikelola: 15 kecamatan
- Desa yang dipercepat pembangunannya:
  a) Desa Tertinggal: 1.043 desa;
  b) Desa Berkembang: 507 desa

SUMBER DATA

- Kementerian PPN/Bappenas 2023
- Batas Admin BIG 2018

PENYUSUN

Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas

RANCANGAN FOKUS KEGIATAN DAN LOKASI PRIORITAS

- **Pengembangan Kawasan Strategis** yang difokuskan utamanya di **KEK MBTK; DPP Derawan-Berau;** DPP Sambas-Singkawang; KI Surya Borneo; KI Batanjung; KI Jorong; KI Batu Licin; KI Ketapang dan KI Tanah Kuning.
- **Pengembangan Sektor Unggulan** akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas, lada, karet, kelapa, kopi, serta perikanan budi daya. Perikanan budi daya dikembangkan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, benih ikan air tawar dan sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat.
- **Pengembangan Kawasan Perkotaan** antara lain **Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota besar yang menjadi wilayah mitra (Balikpapan dan Samarinda),** pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan).
- **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi** yang difokuskan pada 6 PKSN, 37 kecamatan lokpri perbatasan, **9 kawasan transmigrasi,** 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate*, **11 KPPN,** 1.460 desa tertinggal, dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi mandiri.
- **Pengembangan Kelembagaan dan Keuangan Daerah** untuk peningkatan capaian SPM, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN, penguatan GWPP, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, percepatan peta bidang tanah dan ruang, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penetapan RTR KSN, RTRW, dan RDTR IKN, serta penyediaan peta dasar skala besar.

Highlights Major Projects 2023 Provinsi Kalimantan Timur

PN	Major Projects	Lokasi Pelaksanaan Kota/Kabupaten	Review/Catatan
1	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) masih sampai level Provinsi	Pembangunan PLTS Atap di Gedung K/L 2 unit
1	Pengelolaan Terpadu UMKM	Kab. Kutai Kartanegara	Dalam penjajakan dengan CV. Nares dan PT. Natgreen
1	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan*	Kabupaten Penajam Paser Utara	
2	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda	1. Pembangunan hunian ASN/TNI/Polri sudah dimulai dan difokuskan pada KIPP 2. Pengembangan bendungan Sepaku Semoi dan bandara APT Pranoto masih dalam proses 3. Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN beserta das di sekitarnya sudah dilakukan dan akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya
3	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	514 kab/kota	
3	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	514 kab/kota	
3	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	514 Kab/Kota	
5	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	Kota Balikpapan	RDMP *Rescaling* RU V Balikpapan pada tahun 2022 telah melaksanakan EPC
5	18 Waduk Multiguna	Waduk Lambakkan: Kab. Paser	Perencanaan: Investigasi Tanah
5	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)		1. Sedang dibangun Hunian Pekerja Konstruksi (IKN), sejumlah 1.072 Unit (APBN) 2. Sedang dibangun Rumah Susun Perwakilan BPKP Kota Samarinda sejumlah 60 unit (APBN)
5	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Tersebar di 509 kab/kota	1. Akan dilakukan pembangunan SPAM berupa kegiatan lanjutan pembangunan IPA kap 300 lpd dan bangunan pendukung SPAM Sepaku 2. Akan dilakukan kegiatan pembangunan jaringan pipa transmisi air minum Sepaku paket 1 dan 2 serta pembangunan JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap I dan II
5	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Seluruh kota/kabupaten	1. Pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN 2. Pembangunan Jaringan Perpipaan 1, 2 dan 3 KIPP IKN

Persebaran Usulan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang Prospektif Masuk RKP 2024

USULAN DAERAH

1	Preservasi Jalan Batas Tenggarong - Sp. Blusuh - Batas Kalteng (A)
2	Preservasi Jalan Sangatta - Sp. Perdau - Akses Pelabuhan Maloy Baru (A)
3	Preservasi Jalan Barong Tongkok - Sp. Tering - Batas Mahulu (A)
4	Pembangunan Jalan Tering - Ujoh Bilang - Long Bagun - Long Pahangai (A)
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh Kel. Gunungsari Ulu (L)

Keterangan : Font Hitam = Usulan Rakortekrenbang; Font Underline = Major Project
A = Diakomodir; L = Dibahas Lebih Lanjut

Di samping 5 usulan yang terlampir pada peta, terdapat 14 usulan lain yang berpotensi dibahas lebih lanjut pada Forum Musrenbangnas 2023.

PRIORITAS NASIONAL

- PN 02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

MAJOR PROJECT

MP - Ibu Kota Negara

Potret Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

IKFD Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (2019-2021)

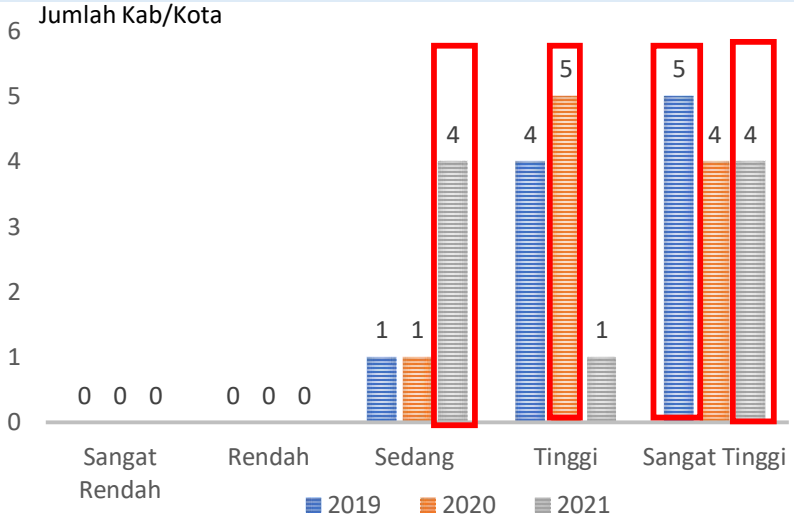

Alokasi TKD (Anggaran 2023)

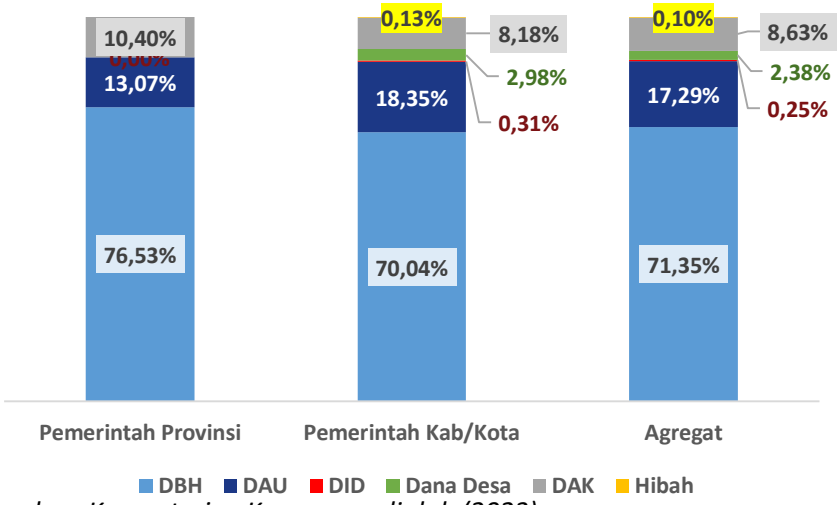

Sumber: Kementerian Keuangan, diolah (2023)

Pendapatan dan Belanja (2022)

Dalam Miliar Rupiah

Komponen Pendatan	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Agregat
1 .Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.585,71	2.992,13	9.577,84
	60,63%	*13,28%*	*28,68%*
a. Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	5.465,11	1.696,37	7.161,47
	50,31%	*7,53%*	*21,44%*
b. Sumber PAD Lainnya	*1.120,60*	*1.295,77*	*2.416,37*
	10,32%	*5,75%*	*7,24%*
2. Pendapatan Transfer	4.263,49	19.356,27	23.619,76
	39,25%	*85,89%*	*70,72%*
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12,60	187,37	199,97
	0,12%	*0,83%*	*0,60%*
Total Pendapatan Daerah	10.861,80	22.535,77	33.397,58

Komponen Belanja	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Agregat
1. Belanja Operasi	5.820,95	17.341,42	23.162,37
	50,61%	*70,96%*	*64,45%*
2. Belanja Modal	1.750,52	4.367,20	6.117,73
	15,22%	*17,87%*	*17,02%*
3. Belanja Tidak Terduga	272,00	492,80	764,80
	2,36%	*2,02%*	*2,13%*
4. Belanja Transfer	3.658,30	2.235,62	5.893,92
	31,81%	*9,15%*	*16,40%*
Total Belanja Daerah	11.501,77	24.437,05	35.938,82

Proporsi	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab/Kota	Agregat
Fungsi Pelayanan Umum	51,12%	38,43%	42,49%
Fungsi Ketertiban dan Keamanan	0,08%	0,45%	0,33%
Fungsi Ekonomi	12,15%	15,29%	14,28%
Fungsi Lingkungan Hidup	0,19%	1,52%	1,09%
Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum	0,88%	3,63%	2,75%
Fungsi Kesehatan	13,46%	16,68%	15,65%
Fungsi Pariwisata dan Budaya	0,09%	0,22%	0,18%
Fungsi Pendidikan	21,92%	23,45%	22,96%
Fungsi Perlindungan Sosial	0,11%	0,35%	0,28%

Perlu Menjadi Perhatian

- **Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Provinsi Kalimantan Timur** masuk dalam kategori **"Tinggi" (2019 – 2021).** Sementara, **IKFD mayoritas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur** sebelumnya masuk dalam kategori **"Sangat Tinggi" (2019),** namun mengalami penurunan menjadi **"Tinggi" (2020).** Pada tahun 2021, IKFD mayoritas kabupaten/kota masuk dalam kategori **"Sedang"** dan **"Sangat Tinggi".**
- **Sumber pendapatan Provinsi Kalimantan Timur didominasi** oleh **Pendapatan Asli Daerah (PAD),** namun sumber **pendapatan Kabupaten/Kota** di Kalimantan Timur secara agregat masih **didominasi** oleh **dana Transfer ke Daerah (TKD)** yang mencapai **70,72% – 85,89%** dari total pendapatan.
- Secara Agregat **alokasi TKD dalam APBD 2023 terbesar** berasal dari **Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU),** dan **Dana Alokasi Khusus (DAK).**
- Belanja **Provinsi dan Kab/Kota secara agregat** masih didominasi oleh **belanja operasional (64,45%)** sedangkan proporsi **belanja modal** masih jauh **lebih kecil (17%)**.
- Belanja fungsi **Kesehatan (15,65%) dan Pendidikan (23%) telah memenuhi ketentuan *minimum mandatory spending*.**

REKOMENDASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE DEPAN

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar, terutama dibidang pendidikan dan kesehatan di daerah 3T, yang didukung dengan **percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas**.
2. **Efisiensi regulasi dan institusi**. Menciptakan regulasi yang mendukung iklim investasi dan perbaikan kinerja dan koordinasi antar institusi.
3. Penggalian sumber-sumber pendanaan pembangunan inovatif seperti skema KPBU, **kerjasama pemanfaatan asset, dan investasi swasta (PMDN dan PMA) untuk mendorong hilirisasi komoditas** unggulan termasuk pertanian dan perkebunan.
4. **Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan** melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor-sektor unggulan daerah yang dikembangkan, dalam rangka peningkatan produktivitas.
5. Persiapan Kalimantan Timur, khususnya wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara untuk **menangkap peluang kerja sama dari pembangunan Ibu Kota Nusantara** serta pemindahan pemerintahan mulai tahun 2024.

Kementerian PPN/ Bappenas

ASEAN INDONESIA 2023

TERIMA KASIH